

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, PENERIMAAN
RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN, SERTA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2012-2016**

Wahyu Apriani¹⁾ Agus Suprijanto²⁾, Ari Pranaditya³⁾

¹⁾Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pandanaran Semarang

²⁾³⁾⁴⁾Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Pandanaran Semarang

Tahun 2017

ABSTRACT

Revenue and Expenditure Budget essentially one policy instrument that is used as a tool to improve public service and welfare in the area i accordance with the broad objectives of regional autonomy and responsibility.

The purpose of this research is to determine the impact of the component of regional revenue Sconsisting of regional tax, retribution, income of asset utilization from separated area and other Regional revenues to the regional revenue of Salatiga City.

This research used secondary data which obtained from realization of revenue and expenditure of the Salatiga city for the years 2012-2016. The data was analyzed by t-test..

The results showed that the regional tax was influence the regional revenue of salatiga city with t-test 11,273 and significance probability of 0,000, the retribution regional influence the revenue of Salatiga cityt with t-test 8,685 and significance probability of 0,000. Further resultsshowed that income of asset utilization from separated area influence the regional revenue of Salatiga with t-test 6,107 and significance probality of 0,000, and the other regional revenue of legitimate was influence the regional revenue of Salatiga city with t-test 4,393 and significance probability of 0,000.

Keywords : Regional tax, retribution regional, income of asset utilization from separated area, other regional revenue of legitimate, regional revenue.

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komponen pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Salatiga.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kota Salatiga selama lima tahun (2012-2016) dan alat analisis yang digunakan adalah uji statistik t.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai t_{hitung} 11,273 dan signifikansi 0.000, retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan daerah dengan nilai t_{hitung} 8,685 dan signifikansi 0,000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai t_{hitung} 6,107 dan signifikansi 0,000, dan lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai t_{hitung} 4,393 dan signifikansi 0,000.

Kata kunci : *Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan asli daerah.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab nyata pada pemerintahan daerah secara proporsional. Dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik yang berupa uang maupun sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah secara transparan. Kriteria keberhasilan pelaksanaan sistem ini

adalah tertampungnya aspirasi semua warga, dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pertanggungjawaban eksplorasi sumber daya yang ada dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan.

Akuntansi Sektor Publik (ASP) adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti

politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi.

Otonomi bagi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah kota Salatiga dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki.

Pembiayaan pembangunan daerah, khususnya pembangunan untuk daerah Kota Salatiga sebagian besar masih didominasi adanya dana bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi, baik bantuan dari pemerintah pusat, maupun dari pemerintah provinsi yang berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus ataupun dana-dana untuk kegiatan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain.

Kota Salatiga didalam era otonomi daerah ini mulai memacu diri untuk menggali potensi-potensi dalam bidang ekonomi khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka atas upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga untuk digunakan dalam pembiayaan pembangunan yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sudah tentu harus didukung oleh dana yang memadai dan berdasarkan kenyataan yang ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan dana untuk membiayai pembangunan sangat besar. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang harus digali dari dalam wilayah daerah yang

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk menganalisis dan menyikapi perencanaan pembangunan ekonomi yang bersumber dari berbagai subyek-subyek sumber pendapatan yaitu yang berupa penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan laba usaha daerah, dan sumber penerimaan lain-lain yang sah.

Tabel 1
Analisis Anggaran Data 2012-2013

No	Uraian	Anggaran 2012	Anggaran 2013	% Perubahan
1	Penerimaan Pajak Daerah	13.739.100.000	19.058.955.000	38,7
2	Penerimaan Retribusi Daerah	8.366.956.000	10.032.028.000	19,9
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	3.400.757.000	4.246.485.000	24,9
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.664.650.000	54.386.182.000	44,4
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	63.171.463.000	87.723.650.000	38,9

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017

Tabel 1.2
Analisis Realisasi Data 2012-2013

No	Uraian	Realisasi 2012	Realisasi 2013	% Perubahan
1	Penerimaan Pajak Daerah	18.695.207.840	24.383.336.232	30,4
2	Penerimaan retribusi Daerah	10.185.796.292	13.120.666.772	28,8
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.386.235.556	4.272.634.922	26,2
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.531.611.273	64.323.812.395	41,3
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	77.798.870.961	106.100.450.499	36,4

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017

Pada penerimaan pajak daerah, anggaran 2012 ke anggaran 2013 mengalami peningkatan **38,7%** yang semula sebesar 13.739.100.000 menjadi 19.058.955.000. Dengan anggaran 2012 sebesar 13.739.100.000 tercapai realisasi sebesar 18.695.207.840. Pada anggaran 2013 penerimaan pajak daerah sebesar 19.058.955.000 terealisasi sebesar 24.383.336.212. Sehingga dengan realisasi 2012-2013 memiliki presentase peningkatan sebesar 30,4%.

Penerimaan retribusi daerah, dianggarkan 2012-2013 terjadi peningkatan sebesar 19,9%. Anggaran penerimaan pajak daerah tahun 2012 sebesar 8.366.956.000 dan untuk tahun 2013 adalah 10.032.028.000. Penerimaan retribusi daerah tahun 2012 memiliki realisasi 10.185.796.292 dan untuk tahun 2013 terealisasi 13.120.666.772. Dengan

demikian penerimaan retribusi daerah memiliki presentase kenaikan sebesar 28,8%.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tahun 2012 memiliki anggaran sebesar 3.400.757.000 tahun 2013 dengan anggaran 4.246.485.000 memiliki peningkatan sebesar 24,9%. Dengan realisasi tahun 2012 sebesar 3.386.255.556 dan realisasi 2013 sebesar 4.272.634.922, maka pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki presentase peningkatan sebesar 26,2%.

Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan anggaran tahun 2012-2013 masing-masing sebesar 37.664.650.000 dan 54.386.182.000 yang mengalami peningkatan sekitar 44,4%. Dengan realisasi tahun 2012 45.531.611.273 dan realisasi 2013 64.323.812.593, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki peningkatan sebesar 41,3%.

Dengan demikian jumlah Pendapatan Asli Daerah di anggaran tahun 2012 sebesar 63.171.463.000 dan anggaran tahun 2013 sebesar 87.723.650.000 yang terealisasi sebesar 77.798.870.961 di tahun 2012 dan 106.100.450.499 di tahun 2013. Dengan peningkatan realisasi sebesar **36,4%** ,

Dengan semakin efisinya pemungutan dan penyeteroran pajak dan retribusi daerah maka semakin meninggi antusias masyarakat Salatiga. Sehingga dengan meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah secara langsung mendorong Pendapatan Asli Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Rahman (2005) Pendapatan Asli Daerah adalah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

- (1) Pajak daerah
- (2) Retribusi daerah
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adisasmita (2011) yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Klasifikasi Pajak Daerah

Pengklasifikasian Pajak Daerah sebagai berikut: Jenis Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor,, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak meliputi:

- a) Fungsi penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b) Fungsi pengaturan (*regulator*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
- c) Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
- d) Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan.

Retribusi Daerah

Menurut UU no. 28 tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Ciri -Ciri Retribusi Daerah

Retribusi daerah memiliki Ciri-ciri antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Retribusi tersebut dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Didalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan
- d. Retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan/ atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi Daerah memiliki Jenis-jenis antara lain ialah sebagai berikut :

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum, ialah retribusi atas jasa yang disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan

kepentingan dan juga kemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Pasar
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- e. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- f. Retribusi Pelayanan Kesehatan(Jasmani)
- g. Retribusi PelayananPersampahan ataupun kebersihan
- h. Retribusi Penggantian suatu Biaya cetak KTP (kartu tanda penduduk) serta juga Akte suatu Catatan Sipil.

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha, ialah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut suatu prinsip komersial disebabkan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Penyedotan kakus

- f. Retribusi Rumah Potong Hewan
- g. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu, ialah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah didalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi ataupun badan yang dimaksudkan untuk dapat pembinaan, pengaturan, pengendalian dan juga pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, barang, ataupun fasilitas tertentu yang guna melindungi kepentingan umum dan juga menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN

3. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya di titik beratkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mencatat penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga

- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan meliputi :

- a). Variabel Independen antara lain :
penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil penegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b). Variabel Dependen antara lain :
pendapatan asli daerah.

Populasi Dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2009), adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Kota Salatiga dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 89.928 dan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebesar 93.887 maka jumlah seluruh penduduk Kota Salatiga adalah 183.815 pada tahun 2015.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, menarik beberapa populasi untuk menjadi sampel, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2010).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. *Convenience sampling* berarti unit sampling yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid, 2007).

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagian kecil masyarakat Kota Salatiga yang diambil secara acak sebanyak 100 responden.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan penelitian dengan cara mengajukan daftar pertanyaan langsung kepada responden, yaitu orang pribadi dari Kota Salatiga. Sementara data sekunder didapatkan dari Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga

Sementara data sekunder didapatkan dari Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga berupa tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berupa statistik deskriptif dan kuantitatif, dimana statistik kuantitatif meliputi uji instrumen, uji statistik klasik, regresi linier berganda dan uji *goodness of fit* (uji t dan F) dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005).

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
P1	.627**	.000	Valid
P2	.576**	.000	Valid
P3	.427**	.000	Valid
P4	.556**	.000	Valid
P5	.637**	.000	Valid
P6	.542**	.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Penerimaan Retribusi

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
R1	.326**	.000	Valid
R2	.106**	.296	Tidak Valid
R3	.049**	.626	Tidak Valid
R4	.214**	.003	Valid
R5	.332**	.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Tabel 5
Hasil Uji Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
KD1	.557**	.000	Valid
KD2	.667**	.000	Valid
KD3	.638**	.000	Valid
KD4	.635**	.000	Valid
KD5	.468**	.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
PL1	.189**	.060	Tidak Valid
PL2	.200**	.047	Valid
PL3	.315**	.001	Valid
PL4	.332**	.001	Valid
PL5	.742**	.016	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua butir pernyataan untuk variabel penelitian valid.

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Menurut Ghozali (2005), uji reliabilitas dikatakan untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.06 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2005).

Tabel 7
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Item	Keterangan
Penerimaan Pajak Daerah	0.813	6	Reliabel
Penerimaan Retribusi Daerah	0.718	5	Reliabel
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.731	5	Reliabel
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga	0.592	5	Reliabel
Pendapatan Asli Daerah	0.619	5	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

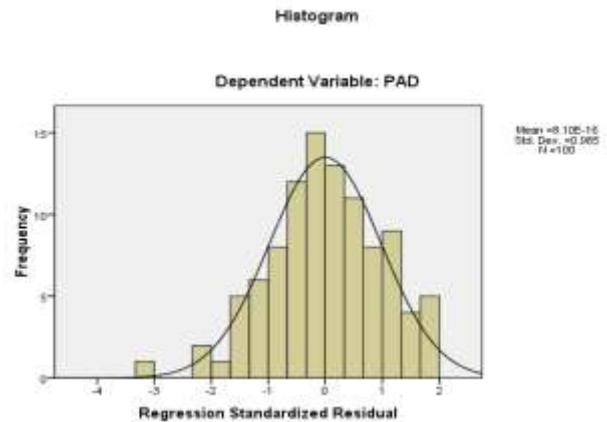
Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,06.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas dengan Analisis Grafik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar 2
Grafik Uji Normalitas Data



Berdasarkan tampilan histogram yang terlihat kurva dependen dan regression standardized residual membentuk gambar seperti lonceng. Oleh karena itu, berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak digunakan untuk menguji.

b. Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikol, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* serta besaran korelasi antar variabel independen.

Tabel 8
Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak	.949	1.053
Retribusi	.820	1.219
Kekayaan	.913	1.095
Pendapatan	.843	1.186

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Penerimaan padak daerah mempunyai nilai tolerance 0.949, penerimaan retribusi daerah mempunyai nilai tolerance 0.820, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai nilai tolerance 0.913, dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempunyai nilai tolerance 0.843. Dan penerimaan pajak daerah mempunyai nilai VIF 1.053, penerimaan retribusi daerah mempunyai nilai VIF 1.219, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai nilai VIF 1.095, dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempunyai nilai VIF 1.186.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolonieritas karena nilai tolerance di atas 0.10 dan nilai VIF (*variance inflation factor*) dibawah 10.

3. Uji Regresi Berganda

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1			
(Constant)	4.074	4.975	
PAJAK	1.037	.092	.539
RETRIBUSI	1.003	.115	.446
KEKAYAAN	.973	.159	.298
PENDAPATAN	.807	.184	.223

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = 4,074 + 1,037 X_1 + 1,0037X_2 + 0,973 X_3 + 0,807X_4$$

4. Goodness of Fit

a. Uji t

Tabel 10
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.074	4.975		.819	.415
PAJAK	1.037	.092	.539	11.273	.000
RETRIBUSI	1.003	.115	.446	8.685	.000
KEKAYAAN DAERAH	.973	.159	.298	6.107	.000
PENDAPATAN N LAIN-LAIN	.807	.184	.223	4.393	.000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Tabel di atas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Karena nilai t disemua variabel bebas bernilai positif maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli daerah. Dan juga masing-masing variabel bebas memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05 sehingga masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat.

Tabel 11
Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F
1	Regression	3770.852	4	942.713	91.559
	Residual	978.138	95	10.296	
	Total	4748.990	99		

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Kekayaan, Pajak, Retribusi

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 11 di atas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0,05 ($0,000 < 0,05$) ini berarti bahwa variabel independen yaitu penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pendapatan asli daerah yang sah mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap PAD.

c. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan lain-lain yang sah) secara serentak terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen, koefisien dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Uji Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.891 ^a	.794	.785	3.20877

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Kekayaan, Pajak, Retribusi

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel *Model Summary*, diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,785. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) terhadap variabel

dependen (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 78,5%. Sedangkan sisanya sebesar 21,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

PENUTUP

1. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa penerimaan retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Variabel independen yang paling dominan pada penelitian ini adalah variabel penerimaan pajak daerah. Dengan nilai beta yang paling besar

diantara variabel independen lainnya yaitu sebesar 0,539.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Kusufi Syam, 2008, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Andrian, Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Glacika Indonesia
- Eka Setyawati, 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Indonesia: Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ghozali, Imam, 2009 *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Semarang : Universitas Diponegoro Edisi IV.
- Gunadi. "Pelaksanaan Pelayanan Prima di Lingkungan Birokrasi". Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Pegawai Depkeu Magelang, 2006.
- Halim, Abdul, 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta
- Hamid, Abdul. 2007, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Jakarta
- Irianto, Slamet Edi, 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta

Marihot P.Siahaan, 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Pers

Nattahidin, 2001. *Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi*. Manajemen Keuangan. Yogyakarta

Priyatno, Dwi, 2010. *Mandiri Belajar SPSS untuk Analisis Data dan Uji Statistik*, Yogyakarta : PT. Buku Kita

Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariabel*, Jakarta : Gramedia Sugiyono. 2009, *Meode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta